

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banjarmasin

Sejarah singkat Kota Banjarmasin (Pemerintah Kota Banjarmasin, 2022), yang dulu dikenal dengan sebutan Kota Tatas, berawal dari wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih, yang berasal dari Desa Oloh Masih. Desa ini berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang kemudian dipimpin oleh Pangeran Samudera, putra dari Kerajaan Daha. Pangeran Samudera mendirikan Kerajaan Banjar dan menaklukkan wilayah Muara Bahan, menjadikan sungai sebagai jalur perdagangan utama. Setelah dibantu oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Banjar bersekutu dengan Demak berperang melawan kerajaan Daha dan berhasil menang. Pada tanggal 24 September 1526, Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah, yang kemudian dijadikan Hari Jadi Kota Banjarmasin.

Lambang kota Banjarmasin terdiri dari bentuk dasar (tameng/perisai), warna dasar (kuning emas), rumah banjar, perahu tambangan, sepasang pelapah nipah, dan kayuh baimbai (cara bekerja). Lambang kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.1, Lambang Kota Banjarmasin

Simbol-simbol pada Lambang Kota Banjarmasin memiliki arti dan makna yaitu sebagai berikut.

- a. Bentuk Dasar (Tameng/Perisai) memiliki arti percampuran antara penduduk asli Suku Dayak dan Banjar yang digabungkan sehingga menjadi satu.
- b. Warna Dasar (Kuning Emas) merupakan gambar kesuburan dan kemakmuran.
- c. Rumah Banjar, dalam konteks ini beberapa jenis rumah Banjar melambangkan kediaman para raja, penyimpanan harta, tempat para santri, serta tempat tinggal para dayang-dayang dan pejabat.
- d. Perahu Tambangan merupakan gambaran alat transportasi yang menghubungkan kampung dan rumah karena Kota Banjarmasin terendam air.
- e. Sepasang Pelapah Nipah, melambangkan dasar ekonomi masyarakat.
- f. Kayuh Baimbai (Cara Bekerja), merupakan simbol cara bekerja sesuai adat dan budaya Banjar, yang menggambarkan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat.

2. Data UMKM Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin, berikut adalah jumlah usaha mikro yang terdaftar pada Dinas Koperasi.

Tabel 4.1, Data Usaha Mikro Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	MIKRO
I	<i>Kec. Banjarmasin Timur</i>	
1	Kelurahan Kuripan	906
2	Kelurahan Pekapuran Raya	1004
3	Kelurahan Pengambangan	598
4	Kelurahan Kebun Bunga	599
5	Kelurahan Karang Mekar	145
6	Kelurahan Sungai Lulut	425
7	Kelurahan Sungai Bilu	328
8	Kelurahan Benua Anyar	739
9	Kelurahan Pemurus Luar	600
Jumlah		5,344
II	<i>Kec. Banjarmasin Tengah</i>	
1	Kelurahan Pekapuran Laut	500
2	Kelurahan Kertak Baru Ilir	367
3	Kelurahan Gadang	606
4	Kelurahan Kertak Baru Ulu	237
5	Kelurahan Mawar	366
6	Kelurahan Pasar Lama	601
7	Kelurahan Antasan Besar	599
8	Kelurahan Teluk Dalam	537
9	Kelurahan Sungai Baru	472
10	Kelurahan Seberang Mesjid	389
11	Kelurahan Melayu	362
12	Kelurahan Kelayan Luar	610
Jumlah		5,646
III	<i>Kec. Banjarmasin Utara</i>	
1	Kelurahan Alalak Tengah	107

2	Kelurahan Kuin Utara	603
3	Kelurahan Pangeran	731
4	Kelurahan Alalak Selatan	112
5	Kelurahan Alalak Utara	604
6	Kelurahan Antasan Kecil Timur	136
7	Kelurahan Sungai Jingah	616
8	Kelurahan Surgi Mufti	596
9	Kelurahan Sungai Miai	537
10	Kelurahan Sungai Andai	600
Jumlah		4,642

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	MIKRO
IV	<i>Kec. Banjarmasin Barat</i>	
1	Kelurahan Belitung Utara	779
2	Kelurahan Teluk Tiram	648
3	Kelurahan Pelambuan	630
4	Kelurahan Telawang	600
5	Kelurahan Telaga Biru	601
6	Kelurahan Basirih	605
7	Kelurahan Kuin Selatan	325
8	Kelurahan Kuin Cerucuk	976
9	Kelurahan Belitung Selatan	444
Jumlah		5,608

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	MIKRO
V	<i>Kec. Banjarmasin Selatan</i>	
1	Kelurahan Kelayan Barat	570
2	Kelurahan Kelayan Dalam	497
3	Kelurahan Kelayan Selatan	876
4	Kelurahan Kelayan Tengah	905
5	Kelurahan Pemurus Baru	114
6	Kelurahan Pemurus Dalam	600
7	Kelurahan Tanjung Pagar	599
8	Kelurahan Kelayan Timur	210
9	Kelurahan Pekauman	294
10	Kelurahan Murung Raya	622
11	Kelurahan Mantuil	170

12	Kelurahan Basirih Selatan	127
Jumlah		5,584
Total Keseluruhan		26,824

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin*

Data jumlah UMKM secara menyeluruh di Banjarmasin (Diskop UKM Kalsel, 2024) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2, Data UMKM di Banjarmasin

Mikro (2023)	Kecil (2023)	Menengah (2023)	Jumlah UMKM (2023)
8312	11	0	8323

Sumber : data.kalselprov.go.id (Diskop UKM Kalsel, 2024)

B. Gambaran Umum Informan Penelitian

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 - a. Nakula Tahu

Narasumber yang mewakili Nakula Tahu pada penelitian ini adalah owner/pemilik dari Nakula Tahu sendiri yang bernama Sri Rahayu. Nakula Tahu Banjarmasin adalah usaha kuliner F&B (food and beverage) yaitu bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang menjual aneka tahu isi dari mulai tahun 2015. Lokasi Nakula Tahu secara geografis terletak pada Jl. Raya Nakula No.17, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karyawan yang bekerja pada Nakula Tahu sebanyak 15 orang dan memiliki fasilitas untuk mengantarkan makanan jika diperlukan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

b. Warung Makan Raudah

Narasumber yang mewakili Warung Makan Raudah pada penelitian ini adalah salah satu karyawan yang mengelola usaha tersebut yang bernama Mawarni. Warung Makan Raudah adalah usaha UMKM yang bergerak pada bisnis kuliner aneka makanan berat seperti ayam bacem, ayam lalapan, dan ayam kremes. Lokasi Warung Makan Raudah secara geografis terletak pada Jl. Harmoni II No.58-60, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, terdapat beberapa cabang seperti di Jl. Melati Indah No.47, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Karyawan pada Warung Makan Raudah pada Pekapuran Raya sebanyak 15 orang dan memiliki fasilitas untuk mengantarkan makanan jika diperlukan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

2. Instansi Pemerintah Daerah

a. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Narasumber yang mewakili Dinas Pendidikan kota Banjarmasin adalah Bapak Yul Poliatna Rachmanu, AP, M. Si sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan kota Banjarmasin. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memiliki tugas utama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Tugas tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan layanan dan pembinaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab

terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengendaliannya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

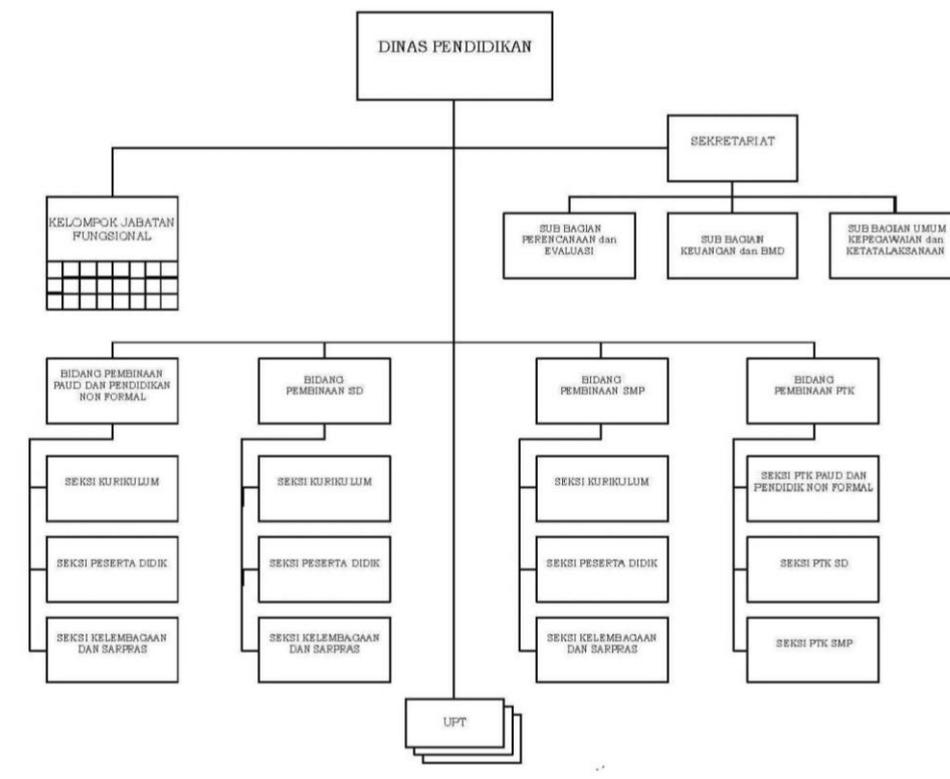
Visi dari Dinas Pendidikan kota Banjarmasin yaitu, “Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal dan Nasional Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas dan Kompetitif.” Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan kota Banjarmasin yaitu meliputi:

- 1) Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata.
- 2) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 3) Mewujudkan Pelaku Pendidikan yang Kuat.
- 4) Mewujudkan Tata Kelola yang Efektivitas.

Dinas Pendidikan kota Banjarmasin memiliki Moto Pelayanan yaitu sebagai berikut.

- 1) Kalau bisa dipermudah kenapa didipersulit.
- 2) Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat.
- 3) Kalau bisa hari ini, kenapa harus esok.

Dinas Pendidikan kota Banjarmasin dipimpin oleh Ryan Utama, S.STP., M.Si. Struktur organisasi Dinas Pendidikan kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.2, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Hubungan antara penelitian ini dengan Dinas Pendidikan adalah program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan makanan bergizi kepada siswa-siswa sekolah. Siswa sekolah ini dinaungi oleh Dinas Pendidikan yang menjadikan dinas ini berperan penting dalam program MBG. Hal inilah menjadikan penelitian ini mengikutsertakan dinas ini untuk mengetahui potensi, kendala, tata kelola dari program MBG.

b. Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Narasumber yang mewakili Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin adalah Ibu Meliyanti, SE, MM sebagai Pengembang Kewirausahaan pada Bidang Usaha Mikro, pada Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Pembentukan Dinas ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Sebelumnya, instansi ini dikenal sebagai Departemen Koperasi dan LPK. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2003, nama lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Kemudian, pada tahun 2008, terjadi perubahan nama menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlaku hingga tahun 2016. Pada tahun tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah digabungkan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga terbentuklah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin seperti yang dikenal saat ini. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dikepalai oleh H.M. Isa Anshari S.E, M.AP.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Yang Berkualitas dan Terciptanya Tenaga Kerja Produktif Serta Berdaya Saing Untuk Menggerakkan Perekonomian Masyarakat.” Sedangkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing.
- 2) Memberdayakan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembangkan koperasi dan usaha mikro.

- 3) Memfasilitasi koperasi dan usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
- 4) Meningkatkan kemitraan/kerja sama antara koperasi, usaha mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
- 5) Mewujudkan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- 6) Mendorong terlaksananya penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
- 7) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- 8) Menjamin terwujudnya perlindungan tenaga kerja.

Hubungan penelitian ini dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah bahwa DISKOPUMKER memiliki tugas dalam pembinaan Usaha Mikro sebagai topik penelitian ini. Dinas ini berperan mengembangkan UMKM agar mampu bersaing dan terlibat dalam program yang memerlukan UMKM. Selain itu, dinas ini dapat memberikan solusi kepada UMKM secara langsung jika menemui beberapa kendala yang dihadapi.

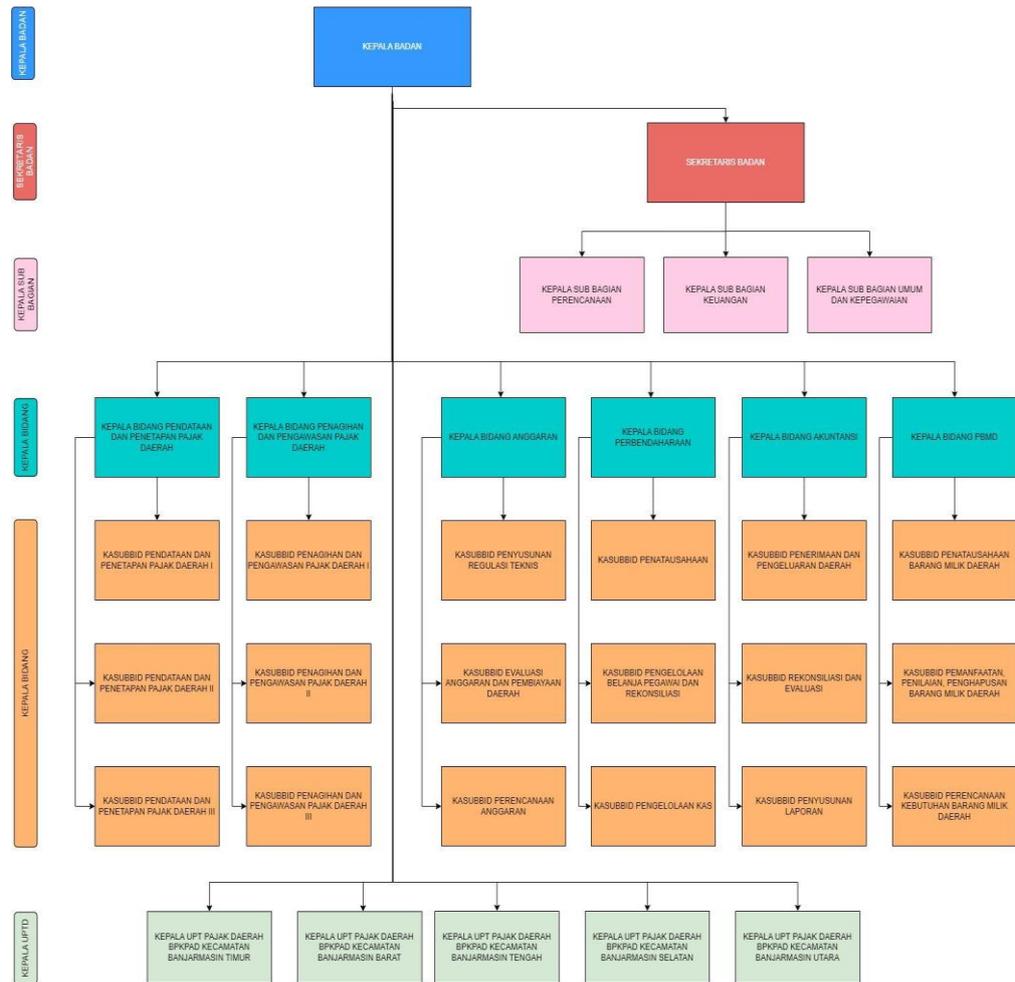
c. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin

Narasumber yang mewakili BPKPAD adalah Ibu Sri Fathanah S.S.T.P., MA, Kepala Sub-Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Bapak Rozie, S. E, sebagai Kepala Sub-Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah pada Bidang Anggaran pada instansi BPKPAD kota Banjarmasin. Penulis mengklasifikasikan Ibu Sri Fathanah sebagai informan I dan Bapak Rozie sebagai informan II. Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota

Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas BAKEUDA, instansi ini memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tipe A. Lembaga ini kini menjalankan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

BPKPAD kota Banjarmasin dipimpin oleh H. Edy Wibowo, S.E. Struktur organisasi BPKPAD yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.3, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

Visi dari BPKPAD kota Banjarmasin yaitu “*Kayuh baimbai menuju Banjarmasin baiman & lebih bermartabat (bertakwa, aman, indah, maju, amanah, nyaman dan lebih bermartabat).*” Sedangkan misi dari BPKPAD adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.

- 2) Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- 3) Memperkuat ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Hubungan penelitian ini dengan BPKPAD adalah badan ini memiliki tugas dalam pengelolaan dana daerah. Peneliti mengikutsertakan BPKPAD untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam keuangan daerah serta apakah keuangan daerah/APBD diperlukan dalam program MBG. Selain itu, peneliti ingin mengetahui pandangan BPKPAD yang berurusan pada keuangan daerah terhadap program MBG.

C. Hasil Wawancara dan Dokumentasi

1. Nakula Tahu¹

a. Potensi Peningkatan Pendapatan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurut informan, program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang menjadi pemasok makanan. Dengan adanya program ini, pasar mereka bertambah secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan omzet dan pemasukan. Selain peningkatan pendapatan, informan juga menyoroti aspek kestabilan penghasilan. Melalui program ini, mereka mendapatkan pesanan rutin dalam periode tertentu, yang memberikan kepastian dalam pendapatan usaha. Dalam satu bulan, ada beberapa hari khusus yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan makanan dari program MBG, sehingga sangat membantu menjaga keberlanjutan usaha mereka.

b. Potensi Peningkatan Jumlah Pelanggan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan menyatakan bahwa program MBG memiliki potensi besar meningkatkan jumlah pelanggan bagi pemasok makanan. Hal ini dikarenakan para siswa yang menerima makanan dari program ini dapat menjadi perantara dalam memperkenalkan produk kepada keluarga mereka. Jika anak-anak menyukai makanan yang disediakan dan mengetahui bahwa harganya terjangkau, mereka cenderung menceritakannya kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya. Hal ini berpotensi menjadikan keluarga

¹ Wawancara dilaksanakan di Nakula Tahu, Jl. Raya Nakula No.17, Pemurus Dalam, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025.

mereka sebagai pelanggan baru bagi pemasok makanan yang terlibat dalam program MBG. Seiring waktu, efek dari promosi tidak langsung ini dapat membantu usaha semakin berkembang dan memperluas pasar.

c. Potensi Peningkatan Kualitas Produk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam konteks ini informan menyatakan bahwa program MBG mendorong pemasok makanan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan dan standar yang harus dipenuhi dalam penyediaan makanan untuk program ini. Selain itu, pemasok makanan yang terlibat dalam program MBG memungkinkan mendapatkan pembekalan dari pemerintah mengenai standar makanan yang harus dipenuhi, termasuk proses produksi yang lebih higienis. Dengan adanya pedoman tersebut, secara otomatis kualitas produk olahan yang dihasilkan akan meningkat, baik dari segi kebersihan, kandungan gizi, maupun cita rasa.

d. Potensi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan menyatakan bahwa keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pemasok makanan. Hal ini disebabkan oleh adanya bimbingan dan pelatihan dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan.

Melalui pelatihan ini, para pemasok memperoleh pengetahuan tentang cara memproduksi makanan yang lebih higienis, cara mencegah keracunan

makanan, serta teknik penyimpanan dan distribusi yang tepat agar makanan tetap layak konsumsi. Dengan adanya pembinaan ini, kualitas tenaga kerja dalam industri makanan pun meningkat, sehingga tidak hanya berdampak pada program MBG, tetapi juga pada usaha mereka secara keseluruhan.

e. Kendala dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kendala utama adalah naik turun harga bahan baku. Harga bahan baku yang naik turun di pasar dapat memengaruhi anggaran yang telah disiapkan. Misalnya, jika modal untuk belanja bahan baku sudah ditetapkan sebesar satu juta rupiah, namun harga bahan baku tiba-tiba naik, maka anggaran tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, waktu pengerjaan juga menjadi tantangan. Pemasok harus menyesuaikan waktu produksi dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga perlu mengatur SDM yang cukup untuk memproduksi dan menyiapkan makanan sesuai waktu yang ditetapkan. Akan tetapi, informan menambahkan bahwa selama bahan baku, alat, dan SDM tersedia dengan baik, serta kualitas rasa makanan tetap terjaga, mereka tidak merasa menghadapi kendala lain yang signifikan dalam memenuhi program ini.

f. Solusi yang Diharapkan oleh Informan terhadap Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurut informan, solusi untuk mengatasi kendala terkait naik-turun/fluktuasi harga bahan baku adalah dengan kebijakan pemerintah mengatur agar harga bahan baku tidak mengalami kenaikan yang terlalu

tajam, tetapi tetap dalam kisaran yang wajar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari kenaikan harga yang tidak terduga, yang dapat mengganggu anggaran yang telah disiapkan. Selain itu, informan juga mengusulkan solusi berupa pelatihan untuk karyawan. Mereka berharap pemerintah menyediakan pelatihan agar SDM mereka dapat lebih siap dalam mengatasi tantangan dalam program ini, seperti mengatur waktu pengerjaan dan kualitas produk, serta meminimalkan kendala yang muncul. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan lebih efektif dan efisien.

g. Harapan Informan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan mengungkapkan harapannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berlangsung dalam jangka panjang, menjadi "*long life thing*." Mereka berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, sehingga dapat terus membantu anak-anak yang mungkin kekurangan asupan gizi di rumah. Dengan adanya bantuan makanan bergizi dari pemerintah, anak-anak dapat mendapatkan asupan gizi yang lebih baik setiap hari. Selain itu, informan berharap agar mereka dapat terlibat dalam program ini. Mereka merasa bahwa partisipasi dalam program MBG akan memberikan dampak positif, baik bagi anak-anak yang menerima manfaatnya maupun bagi usaha mereka sebagai pemasok makanan.

- h. Perspektif Informan terhadap Anggaran Rp. 10.000 per Porsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp. 10.000 per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasa kurang mencukupi, terutama di Banjarmasin. Mereka menyebutkan bahwa harga bahan pokok di daerah ini berbeda dengan di Jawa, kalau di Jawa Rp. 10.000 mungkin masih cukup. Akan tetapi, di Banjarmasin, dengan harga beras dan bahan pangan lainnya yang lebih tinggi, anggaran tersebut dianggap tidak memadai untuk menyediakan makanan yang bergizi.

Menurut informan, untuk memenuhi standar makanan bergizi yang mencakup prinsip 4 sehat 5 sempurna, setidaknya setiap porsi perlu mencakup bahan seperti telur dan susu. Dengan anggaran Rp. 10.000, hanya nasi dan lauk yang bisa disediakan, yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Informan berpendapat bahwa untuk memastikan makanan yang bergizi, anggaran per porsi sebaiknya dinaikkan menjadi sekitar Rp. 14.000 hingga Rp. 15.000.

2. Warung Makan Raudah²

- a. Potensi Peningkatan Pendapatan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam wawancara, informan mengungkapkan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan pendapatan mereka jika terlibat sebagai pemasok makanan. Meskipun awalnya tanggapan informan masih bersifat tidak pasti dikarenakan menjawab dengan singkat, diskusi lebih lanjut dengan peneliti

² Wawancara dilaksanakan pada Warung Makan Raudah, Jl. Harmoni II No.58-60 Pekapuran Raya, pada hari Rabu, 19 Maret 2025

membantu memperjelas bahwa adanya keterlibatan UMKM sebagai penyedia makanan bagi siswa dapat memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Peneliti menjelaskan bahwa sekolah memiliki jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga permintaan terhadap makanan dalam program ini juga dapat meningkat. Informan kemudian mengakui bahwa pendapatan mereka berpotensi bertambah karena adanya pesanan tetap dari program MBG. Dengan demikian, keterlibatan dalam program ini dapat menjadi peluang bagi mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan pelanggan umum.

b. Potensi Peningkatan Jumlah Pelanggan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam wawancara, informan menyatakan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan mereka. Meskipun awalnya tanggapan informan masih singkat, peneliti memberikan gambaran lebih lanjut mengenai bagaimana program ini dapat menciptakan pelanggan yang lebih tetap dan stabil. Peneliti menjelaskan bahwa keterlibatan dalam program ini memberikan kepastian jumlah pesanan yang lebih terjamin. Jika sebelumnya pemasok hanya melayani pelanggan umum dalam jumlah tertentu, dengan adanya program MBG, jumlah pelanggan dapat meningkat secara signifikan dan lebih konsisten. Setelah penulis berdiskusi dengan informan, informan kemudian menanggapi dengan mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah peningkatan pelanggan dari sekolah terlepas dari pelanggan biasanya. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa

selain mendapatkan pelanggan tetap dari program MBG, mereka juga masih memiliki potensi untuk mempertahankan dan menambah pelanggan dari luar program.

c. Potensi Peningkatan Kualitas Produk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan menyatakan bahwa keterlibatan dalam program MBG mendorong mereka untuk menyesuaikan kualitas produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama dalam aspek rasa dan kandungan gizi. Peneliti memberikan gambaran bahwa dalam program ini, makanan harus memenuhi standar tertentu, seperti tidak boleh terlalu asin atau mengandung bahan tambahan berlebihan. Informan mengonfirmasi bahwa mereka memang akan menyesuaikan produknya dengan ketentuan yang berlaku untuk konsumsi siswa. Lebih lanjut, peneliti menegaskan bahwa aspek gizi juga menjadi perhatian utama dalam penyediaan makanan bagi siswa, termasuk batasan penggunaan garam dan bahan tambahan lainnya. Informan mengakui bahwa hal tersebut memang berpengaruh pada cara mereka mengolah makanan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas produk agar lebih sehat dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.

d. Potensi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan berpendapat bahwa program MBG memungkinkan berpengaruh dalam peningkatan SDM. Peneliti berdiskusi dengan informan terkait potensi ini jika informan terlibat sebagai pemasok makanan pada

program MBG. Dari perspektif informan, pengalaman dalam memasak juga menjadi faktor dalam peningkatan kualitas SDM.

e. Kendala dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan awalnya menyatakan bahwa tidak ada kendala yang dihadapinya untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis. Akan tetapi, setelah berdiskusi lebih lanjut terkait kendala dalam terlibat dalam program MBG seperti persaingan dengan usaha yang lebih dekat dengan sekolah. Informan memberikan tanggapan bahwa hal tersebut memungkinkan menjadi kendala. Kemudian setelah diskusi terkait kemungkinan kendala yang berkaitan dengan pemenuhan program ini, terutama dalam hal modal, informan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan kendala yang dihadapinya berupa kekurangan modal.

f. Solusi yang Diharapkan oleh Informan terhadap Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan awalnya menunjukkan keraguan saat ditanyakan mengenai solusi atas kendala-kendala yang dihadapi UMKM. Akan tetapi setelah berdiskusi lebih lanjut, informan memberikan jawaban bahwa bantuan atau pelatihan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM.

g. Harapan Informan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam wawancara ini, ketika peneliti menanyakan harapan informan terhadap program makan bergizi gratis, informan awalnya tampak bingung atau belum memiliki jawaban yang jelas. Kemudian setelah berdiskusi lebih lanjut tentang kemungkinan harapan informan. Informan memberikan

tanggapan bahwa kesempatan untuk lebih terlibat dalam program, adanya pelatihan dalam memenuhi standar gizi jika terlibat, serta peningkatan keterampilan dalam penyediaan makanan bergizi menjadi harapan informan terhadap program MBG.

3. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin³

a. Pandangan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam wawancara dengan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Bapak Yul Poliatna Rachmanu, peneliti menemukan bahwa pihak dinas sangat mendukung program makan bergizi gratis. Program ini dinilai memberikan manfaat besar bagi para murid, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain meningkatkan kesejahteraan siswa, program ini juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua dalam hal pengeluaran untuk konsumsi harian anak-anak mereka.

Akan tetapi, penerapan program ini masih bergantung pada sekolah yang menjalankannya. Dinas Pendidikan sendiri tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, mekanisme program makan bergizi gratis di Banjarmasin untuk saat ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Untuk saat ini program ini baru dilaksanakan di 14 sekolah sebagai percobaan.

Dalam hal peran Dinas Pendidikan, mereka hanya berfungsi sebagai penyedia data siswa yang akan menerima manfaat program. Keterlibatan dinas lebih bersifat administratif (penyedia data) dan terbatas pada

³ Wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Jl. Kapten Piere Tandean No.29, RT.40, Gadang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025.

hubungan antara siswa dan sekolah, sementara pelaksanaan teknisnya sepenuhnya dikelola oleh pihak Badan Gizi Nasional.

b. Potensi Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam konteks ini, informan memiliki pandangan bahwa melalui program ini ada peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis. Beliau memberikan informasi bahwa terdapat lebih dari 880 sekolah di Banjarmasin, keterlibatan UMKM dapat menjadi solusi penyediaan makanan bagi siswa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi, meskipun program ini memiliki potensi yang besar, tantangan dalam pelaksanaan dan pendanaannya masih menjadi kendala utama karena masih belum ada kejelasan dari program ini.

Informan berharap agar sekolah dapat langsung mengelola dan melaksanakan program ini. Dengan demikian, sekolah dapat menjalin kerja sama dengan UMKM lokal sebagai penyedia makanan, yang berpotensi menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informan juga mengungkapkan bahwa terkait sumber pendanaan, informan mengusulkan agar program ini dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Kerja sama Antar-Dinas

Dalam konteks kerja sama/kolaborasi antar-Dinas. Informan memerlukan kepastian dari program tersebut seperti juknas-juknisnya, pelaksana, dan bentuk pelaksanaan di lapangan. Informan memberikan

gambaran bahwa jika diperlukan maka Dinas-Dinas terkait pasti akan bekerjasama jika diperintahkan.

d. Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, beberapa kendala utama dalam program MBG yaitu meliputi kendala anggaran yaitu pemotongan anggaran berdampak pada pelaksanaan program, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana Rp. 10.000,00 per porsi masih relevan di Banjarmasin, tetapi kurang memadai di daerah dengan biaya hidup lebih tinggi. Selain itu, informan juga mengatakan terdapat kendala logistik dan kualitas makanan. Makanan sering terlambat dikirim, sehingga tidak sesuai jadwal makan siswa. Selain itu, makanan dalam kotak mengalami penurunan kualitas setelah lebih dari delapan jam. Keterbatasan sumber daya dinas pendidikan juga menjadi permasalahan tersendiri. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya personel membatasi peran dinas dalam mendukung program secara optimal.

e. Solusi dan Saran dalam Menghadapi Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Informan mengemukakan bahwa solusi terhadap kendala program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Saat ini, dinas hanya berperan dalam menyediakan data siswa, tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan program.

Dari perspektif informan, solusi yang lebih efektif adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dan melaksanakan program ini secara langsung. Dengan demikian, sekolah dapat lebih mudah mengatur

distribusi makanan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien. Jika program ini tetap memerlukan keterlibatan dinas, diperlukan tambahan tenaga kerja agar pengelolaan dapat berjalan optimal dan terkoordinasi dengan baik.

4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin⁴

a. Kerja Sama Dinas Koperasi dan Dinas Pendidikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurut informan dari Dinas Koperasi yang diwakili oleh Ibu Meli Yanti, bersedia menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program MBG. Akan tetapi, untuk saat ini keterlibatan Dinas-Dinas masih kurang jelas dalam program ini. Jika diperlukan, Dinas Koperasi berperan dalam mencari dan mengkoordinasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dapat menjadi pemasok makanan. Fokus utama mereka adalah memastikan UMKM yang dipilih berada di lokasi yang dekat dengan sekolah agar program ini dapat berjalan lebih efektif karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Sementara itu, Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam mendata sekolah serta jumlah murid yang akan menerima manfaat dari program ini. Selain menjembatani UMKM dengan sekolah, Dinas Koperasi juga berperan dalam melakukan pemantauan terhadap standar penyediaan makanan. Mereka memastikan bahwa makanan yang disediakan oleh UMKM memenuhi kriteria yang telah

⁴ Wawancara dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Jl. Komp. Semanda, Sungai Lulut, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.

ditetapkan dalam program MBG serta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program ini.

b. Potensi Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurut informan, UMKM memiliki potensi besar untuk terlibat dalam program MBG, sesuai dengan definisi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, usaha dengan omzet hingga 1 miliar rupiah tetap dikategorikan sebagai UMKM, mencakup berbagai jenis usaha kuliner, dari pedagang kecil hingga rumah makan.

Informan juga memberikan pandangan bahwa terdapat potensi keterlibatan UMKM, akan tetapi terdapat tantangan dalam kapasitas produksi. Satu sekolah saja bisa memiliki hingga 200 murid, yang memerlukan penyediaan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Hal ini dapat berdampak negatif bagi UMKM skala kecil, terutama yang hanya memiliki beberapa pekerja, akan kesulitan memenuhi permintaan ini secara mandiri. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah dengan membentuk kelompok usaha, di mana beberapa UMKM dapat bekerja sama dalam penyediaan makanan, membagi tugas antara memasak nasi, lauk, dan komponen lainnya.

Dari aspek manajemennya, meskipun pengaturan kerja dapat dilakukan secara mandiri, tantangan utama terletak pada tenaga kerja yang harus bekerja intensif setiap hari. Jika tidak ada sistem kerja yang terorganisir dengan baik, tenaga kerja bisa mengalami kelelahan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, kerja sama antar UMKM dan pembagian peran yang jelas menjadi strategi yang lebih efektif untuk memastikan kelangsungan program ini.

c. Potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM

Menurut informan, program MBG memiliki dampak positif terhadap pengembangan UMKM, terutama dalam peningkatan pendapatan. Walaupun kenaikannya mungkin tidak besar, asalkan usaha berjalan lancar setiap hari, pendapatan juga akan meningkat secara bertahap. Konsistensi dalam menjalankan usaha menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi UMKM. Akan tetapi, ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu kapasitas produksi dan tenaga kerja. Informan menyoroti bahwa meskipun potensi peningkatan omzet sangat besar dengan bertambahnya jumlah penerima program, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesiapan untuk menangani permintaan dalam skala besar secara berkelanjutan. Jika tidak memiliki sistem manajemen yang baik atau skala usaha yang lebih besar seperti CV atau perusahaan yang lebih terorganisir, UMKM kecil bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan setiap hari.

d. Potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Peningkatan Pelanggan UMKM

Menurut informan, program MBG berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan bagi UMKM, terutama jika kualitas makanan yang disediakan memuaskan. Jika makanan yang diberikan kepada siswa terasa enak, bergizi, dan harganya terjangkau, maka para orang tua murid akan mencari

tahu catering yang menyediakan makanan tersebut. Hal ini dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pelanggan tambahan di luar program MBG, seperti pesanan dari orang tua untuk acara keluarga, arisan, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, program MBG juga dapat berfungsi sebagai ajang promosi bagi UMKM. Jika layanan dan rasa makanan memuaskan, reputasi UMKM akan meningkat, sehingga pelanggan baru bisa datang melalui rekomendasi dari orang tua murid dan guru. Sebaliknya, jika kualitas makanan kurang baik, maka dapat berdampak negatif, karena orang tua juga akan menanyakan dan mempertimbangkan ulasan sebelum memilih layanan catering.

e. Potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Peningkatan Kualitas Produk UMKM

Menurut informan, keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan memasak dalam jumlah besar setiap hari, pelaku UMKM menjadi lebih terampil dan efisien dalam proses produksi. Misalnya, jika awalnya membutuhkan waktu dua jam untuk memasak suatu menu, seiring waktu, mereka dapat mengurangi waktu tersebut menjadi setengah jam tanpa mengurangi kualitas rasa.

Selain itu, adanya evaluasi rutin dari pelanggan, dalam hal ini siswa dan guru, memungkinkan UMKM untuk memperbaiki cita rasa makanan berdasarkan umpan balik. Jika ada kekurangan dalam bumbu atau rasa, mereka dapat melakukan penyesuaian di masa mendatang. Dengan berjalannya waktu, proses ini membantu pelaku usaha semakin terampil

dalam menyajikan makanan dengan kualitas yang lebih baik. Standar gizi juga menjadi perhatian dalam program ini. Informan menyadari pentingnya mengikuti standar kesehatan dengan mengurangi penggunaan bahan tambahan seperti MSG dan memastikan makanan yang disajikan lebih seimbang secara gizi.

f. Potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Peningkatan SDM UMKM

Menurut informan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada peningkatan jumlah sumber daya manusia (SDM) di UMKM. Dalam menjalankan program ini, UMKM tidak mungkin hanya mengandalkan tenaga kerja dalam jumlah sedikit, seperti dua atau lima orang saja. Beban kerja yang tinggi, menuntut tambahan tenaga kerja untuk memastikan produksi makanan berjalan lancar. Setiap tahap produksi makanan memerlukan tenaga kerja khusus, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, hingga pengemasan dan distribusi. Dengan meningkatnya jumlah pesanan harian dari program MBG, UMKM harus merekrut lebih banyak pekerja untuk menangani berbagai tugas ini. Selain itu, peningkatan SDM juga terjadi dari segi keterampilan. Standarisasi dalam program ini, seperti ketepatan waktu penyajian, kualitas makanan yang sesuai standar gizi, dan kenyamanan tekstur makanan (misalnya tidak terlalu keras atau lembek), mendorong pekerja untuk meningkatkan kemampuan mereka.

g. Kendala yang Dihadapi UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menurut informan, kendala utama yang dihadapi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama berkaitan dengan masalah

keuangan dan ketersediaan tenaga kerja. Dari segi keuangan, UMKM yang terlibat dalam program ini harus memiliki modal besar karena sistem pembayaran dari pemerintah tidak dilakukan secara langsung, melainkan baru diterima setelah laporan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disetujui, biasanya di akhir bulan. Akibatnya, UMKM harus menanggung biaya produksi terlebih dahulu, termasuk pembelian bahan baku dan operasional lainnya. Selain itu, kesulitan dalam merekrut karyawan yang berkualitas juga menjadi tantangan, terutama dalam menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memasak sesuai standar program dan mampu mengolah makanan bergizi dengan cita rasa yang baik. Selain itu, kemungkinan adanya karyawan bekerja seadanya tanpa mempertimbangkan kualitas makanan yang disajikan dapat menjadi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi potensi pengembangan.

h. Solusi Kendala dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut Dinas Koperasi

Sebagai solusi dalam menghadapi kendala, Dinas Koperasi dapat memberikan dukungan utama dalam aspek keuangan, dengan menyediakan akses terhadap pendanaan melalui bantuan pemerintah, pinjaman lunak, atau program kemitraan dengan koperasi yang dapat membantu UMKM memperoleh modal awal yang cukup. Terkait kualitas dari produk yang disediakan untuk program MBG, informan menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan melalui adanya "*tukang cicip*" atau petugas pengecek rasa sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Hal ini

bertujuan untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi, memiliki cita rasa yang baik, dan sesuai dengan preferensi anak-anak, sehingga program MBG dapat berjalan dengan lebih optimal.

i. Kesiadaan Dinas Koperasi dalam Membantu UMKM Mengembangkan Potensi Pengembangan UMKM

Informan dari Dinas Koperasi menyatakan kesediaannya untuk membantu UMKM dalam mengembangkan potensi mereka, terutama dalam aspek permodalan. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui program pinjaman “*Bahuma (Bausaha Tanpa Bunga)*”, yaitu pinjaman modal usaha tanpa bunga yang dapat diajukan oleh UMKM. Dinas Koperasi menegaskan bahwa mereka dapat memberikan rekomendasi dan bantuan dalam proses pengajuan pinjaman ini bagi UMKM yang memenuhi syarat seperti tidak memiliki pinjam di bank lain dan tidak memiliki riwayat kredit macet.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)⁵

a. Potensi Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi UMKM Menurut BPKPAD

1) Informan I

Informan I yaitu Ibu Sri Fathanah dari BPKPAD menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama bagi UMKM. Akan tetapi, hal ini sangat bergantung pada pengelolaan yang benar dan adil. Menurut informan, jika program ini hanya diberikan kepada satu atau dua penyedia catering saja, maka

⁵ Wawancara dilaksanakan di BPKPAD, Jl. Simpang Tirta Dharma No.84, Pemurus Luar, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025.

akan terjadi monopoli. Akibatnya, UMKM lain tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam program ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang baik agar semua UMKM yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat ekonomi dari program ini.

2) Informan II

Menurut Bapak Rozie sebagai informan II, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi ekonomi, terutama bagi UMKM, namun kepastiannya masih bergantung pada kebijakan pusat. Hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, apakah akan diserahkan sepenuhnya kepada UMKM, pihak ketiga, atau bahkan melibatkan institusi seperti TNI. Beberapa daerah percontohan, termasuk Banjarmasin, telah menjalankan program ini melalui pihak ketiga, yang menunjukkan adanya dampak ekonomi bagi pelaku usaha yang terlibat.

Akan tetapi, ada kekhawatiran jika pelaksanaan program dialihkan ke TNI, dengan skema dapur umum yang langsung dikelola oleh mereka, maka pelaku UMKM seperti ibu-ibu kantin sekolah bisa terdampak secara ekonomi. Sejauh ini, skema TNI dalam MBG masih sebatas isu dan belum ada kepastian apakah akan diterapkan secara luas. Selain itu, terdapat isu permasalahan dalam pembayaran kepada vendor atau pihak ketiga yang saat ini melaksanakan program MBG. Beberapa

laporan menyebutkan bahwa pembayaran dari pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, mengalami keterlambatan, yang berpotensi merugikan para pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran pendanaan program ini.

b. Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut BPKPAD

1) Informan I

Informan menjelaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dua sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, pelaksanaan program MBG masih bergantung pada APBN, sementara APBD belum dialokasikan secara spesifik untuk program ini. Penyusunan APBD dilakukan setahun sebelum anggaran berjalan, sehingga anggaran untuk 2025 sebenarnya telah disiapkan pada 2024. Namun hingga sekarang masih belum ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait peruntukan dana APBD untuk MBG. Ketidakjelasan ini juga berlaku untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait apakah dana ini akan dialokasikan ke program MBG.

Ketika peneliti menanyakan lebih lanjut tentang ketidakpastian pendanaan program MBG, informan menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program pemerintahan, semua anggaran harus tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jika anggaran tidak tersedia dalam DPA, maka pemerintah daerah bisa mencari sumber pendanaan lain, seperti dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau

pihak ketiga. Tetapi, informan menekankan bahwa bantuan dari CSR biasanya terbatas dan memiliki syarat tertentu, sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk mendanai program ini.

Secara keseluruhan, kendala utama dalam pendanaan MBG adalah ketidakjelasan regulasi dan juknis penggunaan APBD, serta ketergantungan pada APBN tanpa adanya kepastian dukungan dari APBD. Hal ini membuat program MBG di daerah masih memiliki ketidakpastian dalam hal pendanaan yang berkelanjutan.

Menurut informan, secara birokrasi tidak ada kendala langsung dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah. Hal ini disebabkan karena program ini masih sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN, sehingga pemerintah daerah (PEMDA) belum memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaannya. Di sisi lain, terdapat kendala dari sisi sosial. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa program MBG adalah tanggung jawab penuh pemerintah daerah, padahal PEMDA tidak memiliki anggaran khusus untuk MBG karena belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Informan memberikan informasi yang mengatakan dulu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pernah menyatakan bahwa tidak ada anggaran untuk MBG di tingkat daerah karena belum ada regulasi dari pusat yang menginstruksikan pengalokasiannya.

Dampak dari asumsi sosial ini adalah munculnya kesalahpahaman di masyarakat, banyak orang menganggap bahwa

pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka di sekolah. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa tidak semua masyarakat memahami mekanisme anggaran pemerintah, dan tidak semua orang mengikuti berita atau informasi terkini terkait kebijakan MBG. Akibatnya, ketika program MBG belum mencakup seluruh sekolah atau belum berjalan dengan optimal, masyarakat menyalahkan pemerintah daerah, meskipun secara birokrasi tanggung jawab utama ada di pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada arahan atau regulasi yang mengatur keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam implementasi MBG.

Saat ini, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum sepenuhnya jelas di Banjarmasin, karena masih berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya kepastian mengenai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Meskipun Badan Gizi Nasional disebut-sebut akan menangani MBG secara nasional dan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap daerah, implementasinya masih memerlukan waktu dan tenaga kerja yang sesuai. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pengangkatan pegawai, karena aturan terbaru mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) melarang pengangkatan pegawai non-ASN. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang akan mengisi posisi yang dibutuhkan dalam UPT MBG di daerah.

2) Informan II

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kendala dalam hal anggaran, terutama karena regulasi yang belum jelas. Di tingkat daerah, diisukan APBD hanya direncanakan sebagai dana pendamping, yang kemungkinan besar mencakup distribusi makanan, sementara pendanaan utama berasal dari Badan Gizi Nasional. Kepastian mengenai mekanisme pembagian anggaran dan peran daerah dalam distribusi masih belum ada karena juknis dari pemerintah pusat belum dikeluarkan. Ketidakpastian ini menyebabkan daerah hanya bisa menunggu arahan lebih lanjut, termasuk pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan MBG.

Selain itu, ada isu mengenai sumber dana program ini. Sebagian masyarakat mengira bahwa pendanaan sepenuhnya berasal dari dana pribadi Prabowo Subianto. Akan tetapi, menurut informasi yang didapatkan, pendanaan MBG tetap berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan kemungkinan kontribusi pribadi dari Prabowo hanya mencakup sebagian kecil dari total anggaran.

Permasalahan lainnya, ada usulan dari masyarakat agar dana MBG diberikan langsung kepada orang tua agar mereka dapat membeli makanan sendiri untuk anak-anaknya. Tetapi hal ini berpotensi mengurangi dampak ekonomi bagi UMKM lokal dan menyebabkan ketidakefisienan dalam implementasi program. Selain itu, di tingkat daerah, program ini juga terdampak oleh kebijakan pengetatan anggaran

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Daerah diminta untuk mengurangi belanja anggaran, sementara di sisi lain, di tingkat pusat, alokasi anggaran untuk birokrasi justru membengkak, termasuk penambahan staf khusus dan utusan khusus yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan gaji yang cukup besar. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam kebijakan anggaran antara pusat dan daerah.

c. Solusi Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1) Informan I

Menurut informan, pemerintah, terutama di tingkat daerah, menghadapi kendala dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum adanya regulasi yang jelas. Saat ini, belum tersedia petunjuk teknis (juknis), prosedur standar operasional (SOP), maupun aturan yang mengatur secara spesifik keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini. Contohnya, sistem pengelolaan sampah di Kementerian LHK memiliki susunan tim dan mekanisme kerja yang jelas, yang bisa dijadikan acuan dalam mengelola MBG. Oleh karena itu, terdapat tiga solusi utama yang perlu dilakukan. Pertama, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar peran dan tugas masing-masing pihak dalam pelaksanaan MBG dapat dipahami dan dijalankan secara efektif. Kedua, regulasi dan SOP yang tepat harus segera disusun agar program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga, kepastian anggaran menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program ini.

2) Informan II

Menurut informan, salah satu solusi utama untuk mengatasi kendala anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah dengan mengurangi jumlah kementerian di kabinet agar tidak terlalu gemuk. Pemecahan beberapa kementerian, seperti Kementerian Hukum dan HAM yang kini dipisah menjadi dua, dianggap justru mempermudah koordinasi serta meningkatkan jumlah pegawai dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk gaji ASN dan staf kementerian. Dengan kabinet yang lebih ramping, beban anggaran dapat ditekan, sehingga dana bisa lebih difokuskan untuk program-program prioritas seperti MBG.

Selain itu, saat ini terdapat Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengetatan anggaran, yang bertujuan untuk memastikan pendanaan MBG serta program-program dari wali kota baru yang belum dianggarkan sejak awal tahun. Karena wali kota Banjarmasin baru dilantik pada 20 Februari, program-programnya belum tercakup dalam anggaran daerah. Oleh karena itu, anggaran diketatkan dan sebagian dana disimpan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) agar program-program tersebut bisa tetap berjalan tahun ini.

Dari perspektif pribadi, informan juga menyarankan agar program MBG lebih difokuskan pada anak-anak yang kurang mampu. Menurutnya, dibandingkan memberikan makanan bergizi kepada semua anak tanpa melihat latar belakang ekonomi, lebih baik jika alokasi dana ditingkatkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini,

anggaran yang dialokasikan sekitar Rp10.000 per anak, namun jika program ini ditargetkan hanya untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, anggarannya dapat ditingkatkan menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000 per anak, sehingga kualitas makanan yang diberikan pun lebih baik dan lebih tepat sasaran.

6. Dokumentasi Channel Ferry Irwandi⁶

Sebagai bagian dari teknik dokumentasi, peneliti melakukan analisis terhadap video dari kanal YouTube Ferry Irwandi yang membahas secara kritis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video berdurasi sekitar 11 menit ini dianggap merepresentasikan opini publik serta menunjukkan dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG di tingkat nasional. Oleh karena itu, konten ini relevan untuk dijadikan refleksi terhadap kemungkinan implementasi serupa di daerah, khususnya Kota Banjarmasin.

Dalam video tersebut, Ferry Irwandi menyoroti bahwa program MBG sejatinya bukanlah "gratis" dalam arti harfiah, karena pendanaannya bersumber dari APBN, APBD, bahkan disebut-sebut isu Presiden menggunakan dana pribadi. Pernyataan ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, mengingat dana yang digunakan adalah dana public.

⁶ Hasil dokumentasi visual dari video channel Ferry Irwandi, dengan judul “Makan Siang Gratis”, 23 Januari 2025, <https://youtu.be/EEmfTnEhVJ0>, (diakses pada 4 April 2025).

Lebih lanjut, Ferry juga mengkritik kualitas pelayanan dari vendor yang terlibat dalam program ini. Ia menyebut adanya ketimpangan mutu makanan yang disediakan oleh berbagai rekanan, termasuk insiden-insiden serius seperti keracunan. Hal ini menunjukkan perlunya standarisasi dan pengawasan ketat terhadap UMKM yang dilibatkan, khususnya dalam aspek sanitasi, mutu gizi, serta kapasitas produksi.

Ferry Irwandi juga mengusulkan agar implementasi program dilakukan secara bertahap dan fleksibel, misalnya dengan memulainya tiga hari dalam seminggu sebelum menjadi lima hari penuh. Ia juga menyarankan agar program difokuskan terlebih dahulu pada wilayah-wilayah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi.

Alternatif model pelaksanaan juga ditawarkan melalui pelibatan kantin sekolah atau dapur umum sebagai pelaksana langsung program, dibandingkan menunjuk vendor baru yang belum teruji. Model ini dinilai lebih efisien karena memperpendek rantai distribusi, menurunkan biaya operasional, serta secara langsung membuka ruang pemberdayaan UMKM lokal di sekitar lingkungan sekolah.

Akhirnya, Ferry juga mengingatkan akan adanya risiko sosial jika program MBG dialihkan ke bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dana oleh orang tua siswa, misalnya untuk kepentingan konsumtif seperti judi online. Dengan demikian, pemberian makanan langsung oleh sekolah dengan melibatkan UMKM

dinilai lebih menjamin tercapainya tujuan gizi yang diharapkan, sekaligus meminimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran.

7. Dokumentasi Channel Sepulang Sekolah⁷

Hasil dokumentasi visual dari Channel Sepulang Sekolah dengan pemateri Koirapat Pormponpitak yang membahas secara komprehensif sejarah, perkembangan, dan dinamika pelaksanaan program makan siang gratis di sekolah, khususnya di Amerika Serikat. Berdasarkan video tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis di Amerika Serikat tidak semata-mata memberikan manfaat bagi peserta didik, melainkan juga melibatkan kepentingan industri penyedia makanan. Secara historis, program ini mulai berkembang di Eropa pada abad ke-18 sebagai respons terhadap malnutrisi anak sekolah, lalu diadopsi di Amerika sejak pertengahan abad ke-19 oleh organisasi masyarakat sipil. Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi bagian dari program nasional pada tahun 1935 melalui intervensi pemerintah federal.

Dari sisi ekonomi, program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usaha penyedia makanan. Video menjelaskan bahwa semakin banyak penerima manfaat program, maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh penyedia makanan. Contohnya negara Amerika Serikat, peningkatan siswa penerima makanan gratis dari 15% pada tahun 1969,

⁷ Hasil dokumentasi visual dari video channel Sepulang Sekolah, dengan judul “Siapa Yang Jadi Kaya Dari Program Makan Siang Gratis? Penuh Muslihat! Gizi Aman? |LearnByGoogling”, 11 Maret 2024, <https://youtu.be/RyAX8-KLOHA>, (diakses pada 6 April 2025).

menjadi 73% pada tahun 2017 mendorong peningkatan pembelian pemerintah. Hal ini menunjukkan program publik berskala besar dapat membuka pasar baru dan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha. Akan tetapi, dokumentasi juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini menimbulkan dinamika dan permasalahan baru, terutama berkaitan dengan aktor-aktor ekonomi yang terlibat. Ketika jumlah penerima manfaat meningkat, pengadaan makanan pun menjadi proyek besar yang menguntungkan industri makanan berskala besar. Hal ini menimbulkan minat besar dari berbagai perusahaan makanan, termasuk industri besar seperti produsen *fast food* dan makanan olahan, untuk ikut serta dalam tender pengadaan makan siang gratis. Bahkan terjadi praktik lobi agar produk mereka yang dinilai kurang sehat bisa masuk ke dalam menu makan siang sekolah dengan cara mendapatkan label “makanan sehat”. Keikutsertaan industri besar ini sering kali menggeser peran UMKM lokal, yang seharusnya lebih diutamakan untuk pemberdayaan ekonomi.

D. Pembahasan

1. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara pada instansi pemerintahan daerah, pada program MBG periode percobaan yang dimulai pada awal tahun 2025 menemukan bahwa program MBG di Banjarmasin telah dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa Badan Gizi Nasional/BGN adalah Lembaga pemerintah

yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Tugas utama dari BGN berdasarkan pasal 3 adalah melaksanakan pemenuhan gizi nasional (Presiden Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa program MBG diawasi oleh lembaga pemerintahan pusat sehingga peran pemerintah daerah dalam program MBG di daerah masing-masing dapat dipertanyakan.

Dari segi pelaksanaan program MBG di Banjarmasin, untuk saat ini anggaran per porsi bagi satu siswa penerima program hanya berkisar pada Rp10.000,00. Sedangkan siswa yang menerima manfaat dari program MBG ini menyeluruh tanpa batasan latar belakang sosial siswa. Hal ini berbeda dengan negara Amerika Serikat dengan menyediakan makanan gratis, atau dengan harga yang lebih rendah (subsidi pemerintah), bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah (World Population Review, 2024). Tidak adanya batasan latar belakang siswa yang menerima program seperti pada Amerika Serikat menjadi permasalahan seperti dana yang kurang memadai sehingga implementasi program dapat kurang efektif serta permasalahan perbedaan kebutuhan gizi dan lokasi geografis yang memengaruhi harga. Jika pemerintah menerapkan klasifikasi penerima program, dana per porsi sebesar Rp10.000,00 bisa dapat ditingkatkan lagi sehingga gizi yang diberikan sesuai standarisasi.

Dalam masa percobaan pada awal tahun 2025, sekolah yang telah menerima manfaat dari program MBG di Banjarmasin sendiri masih berjumlah 14 sekolah. Berdasarkan laman web rri.co.id, sekolah yang menerima manfaat dari program MBG tersebut meliputi SDN Pemurus Dalam 1, SDN Pemurus

Baru 2, SDN Pemurus Dalam 8, SMPN 19, SMPN 18, SMAN 9, dan SMAN 10 Banjarmasin. Kemudian TK Trisula II Perwari, TK Adhyaksa XIV, SDN Pangeran 3, SMPN 24, SMP 21, SMPN 13 dan SMKN 4 Banjarmasin (Muhamad, 2025). Sedangkan pembiayaan program saat ini anggaran yang digunakan untuk program MBG di Banjarmasin masih menggunakan APBN.

Peran dinas-dinas dalam program MBG dinilai kurang terlibat. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian pada Dinas Koperasi yang mengatakan bahwa pihaknya masih belum dilibatkan pada program tersebut. Padahal Dinas Koperasi dapat berperan sebagai sarana menjembatani pihak UMKM dengan pihak sekolah yang menerima program tersebut. Dinas Koperasi dapat berperan sebagai monitoring pihak penyedia makanan/supplier dari program tersebut agar program tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dinas Koperasi dapat menentukan UMKM yang dinilai lebih dekat dengan sekolah penerima program agar tidak perlu pengeluaran biaya tambahan serta memantau UMKM yang menjadi pemasok makanan. Permasalahan ini mencerminkan kurangnya penerapan nilai-nilai pada Pasal 41 pada Perpres No. 83 Tahun 2024 yang menekan pada koordinasi dengan instansi pemerintah daerah (Presiden Republik Indonesia, 2024). Hal ini sejalan dengan Plt. Deputi Kemenkko PMK, Nunung Nuryartono menerangkan bahwa program MBG merupakan tanggung jawab bersama (KEMENKOPMK, 2024). Implementasi koordinasi antara lembaga menjadi kunci penting keberhasilan program. Tidak adanya koordinasi yang baik memungkinkan munculnya hambatan pada pelaksanaan program ini.

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan menerangkan bahwa mekanisme program makan bergizi gratis di Banjarmasin untuk saat ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Sedangkan Dinas Pendidikan sendiri berperan sebagai penyedia data-data siswa dan sekolah (bersifat administratif) yang diperlukan dalam program MBG. Dalam laman web rri.co.id, dikatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Ahmad Baihaqi menerangkan, program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional, bukan berasal dari Pemko Banjarmasin. Akan tetapi, karena lingkungannya berada di bawah naungan Disdik, maka pihaknya berkewajiban turut memantau pelaksanaan program tersebut (Muhamad, 2025).

Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi juga bersedia bekerja sama jika diperlukan dalam program ini. Pembagian tugas pokok dan fungsi dari kedua instansi tersebut memungkinkan terciptanya kolaborasi yang dinilai positif bagi program MBG. Kolaborasi antardinas memungkinkan terciptanya efektivitas program dikarenakan adanya pembagian tugas masing-masing. Pembagian tugas tersebut dapat berdampak positif, yaitu dengan pembagian peran tersebut, pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif.

Walaupun program MBG sudah berjalan di beberapa sekolah, efektivitasnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi tersebut terkait efektif atau tidaknya standar gizi yang ditetapkan pemerintah dalam memenuhi standar gizi, serta persepsi siswa penerima program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program MBG bukan hanya sekadar formalitas distribusi makanan, tetapi juga benar-benar berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan

siswa. Penilaian ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan ke depan, terutama jika ada kesenjangan antara standar nasional dan praktik di daerah. Selain itu, kurangnya keterlibatan instansi yang dinilai memiliki peran penting pada keberlangsungan program menjadi permasalahan yang perlu dievaluasi pada program ini.

2. Potensi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Pengembangan UMKM

a. Potensi Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebelum mengetahui potensi pengembangan UMKM, peneliti terlebih dahulu meneliti terkait kemungkinan potensi keterlibatan UMKM dalam program MBG berdasarkan beberapa perspektif. Dalam konteks penyedia makanan program MBG, saat ini suplier makanan menggunakan vendor-vendor. Hal ini menjadi kabar positif bagi UMKM yang ingin terlibat dalam program MBG sebagai supplier makanan. Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi memberikan pandangan yang positif terhadap UMKM yang berpotensi terlibat dalam program MBG sebagai suplier makanan. Peluang ini memungkinkan UMKM berperan aktif dalam program MBG agar mampu meraih potensi pengembangan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melihat adanya peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam program MBG. Keterlibatan UMKM dinilai memiliki potensi strategis sebagai solusi penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek ganda (*multiplier effect*). Keterlibatan UMKM dalam program MBG menjadi sarana pengembangan usaha sehingga usahanya mampu

berkembang hingga dapat membantu perekonomian nasional baik dari segi pajak maupun dari segi penyerap tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan pandangan Satriaji Vinatra (2023, hal. 5–6), UMKM memiliki peran dalam kesejahteraan perekonomian negara dan peran dalam kesejahteraan masyarakat.

MBG dinilai mampu menghidupkan aktivitas ekonomi lokal melalui konsep *home-grown school feeding*, di mana bahan pangan yang digunakan dalam program disuplai oleh petani dan pelaku usaha lokal. Hal ini menjadikan program MBG relevan dalam konteks pemberdayaan UMKM, karena dapat membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekosistem pangan berbasis komunitas (Aji et al., 2025, hal. 222). Pengembangan UMKM menjadi prioritas utama karena memberikan kontribusi signifikan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. UMKM berperan penting dalam penyebaran pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal (Budiwitjaksono & Istyalita, 2023, hal. 33). Dari penjelasan-penjelasan tersebut, MBG bukan hanya sebagai sarana dalam pemenuhan gizi anak, tetapi juga berperan sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian lokal. Konsep *home-grown school feeding* memungkinkan penyediaan bahan baku berasal dari pedagang lokal, didukung makanan yang diolah juga berasal dari pengusaha lokal contohnya UMKM. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimonopoli oleh pengusaha besar saja, tetapi juga dinikmati oleh pengusaha kecil yang saat ini sulit bersaing.

Dinas Koperasi menerangkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk terlibat dalam program MBG, sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 yang mencakup usaha dengan modal hingga 1 miliar rupiah, termasuk berbagai jenis usaha kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha UMKM lokal dapat dijadikan mitra dalam penyediaan makanan bergizi untuk siswa mengingat banyaknya pelaku UMKM yang ada di Banjarmasin dan modal yang dinilai memadai sebagai supplier program.

Dalam laman situs ukmindonesia.id, pemerintah mulai melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah percobaan pada awal tahun 2025. Pengamat UMKM, Muhammad Arbani, menyatakan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak sekolah dan mencegah stunting, tetapi juga dapat mendorong perekonomian UMKM. Disini Arbani mengingatkan bahwa vendor yang terlibat harus benar-benar UMKM, bukan usaha besar yang mengatasnamakan UMKM. juga menyarankan pembentukan wadah organisasi untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan bantuan bagi UMKM agar usaha mereka lebih berkelanjutan (Fathan, 2025). Kritik Arbani menerangkan bahwa adanya control dalam pemilihan vendor program. Permasalahan seperti kurangnya transparansi dalam seleksi mitra program menjadi sorotan tersendiri untuk diawasi oleh pemerintah. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku UMKM dinilai memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemenuhan peran pemerintah dalam menudukung pengembangan UMKM.

Dari perspektif agama Islam adanya program makan bergizi gratis ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada UMKM sebagai pemasok makanan dari program tersebut relevan dengan potongan Q.S. al-Hashr/59:7 berikut.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Dalam konteks ayat tersebut terdapat anjuran distribusi kekayaan terhadap orang yang kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah diharapkan memberikan peluang kepada UMKM kecil agar mampu tumbuh dan berkembang. Perspektif ini memperkuat keterlibatan UMKM dalam program MBG. Kebijakan publik yang sejalan dengan keadilan dalam pendistribusian memungkinkan masyarakat lebih mudah menerima program MBG karena sejalan dengan moral agama.

Dari segi ekonomi, berdasarkan channel Sepulang Sekolah menyebutkan bahwa program makan siang gratis memberikan manfaat ekonomi signifikan dengan menciptakan pasar baru bagi industri penyedia makanan. Peningkatan jumlah penerima manfaat, seperti di Amerika Serikat dari 15% pada 1969 menjadi 73% pada 2017, mendorong lonjakan permintaan yang menguntungkan produsen makanan, baik skala besar maupun UMKM jika dilibatkan. Selain meningkatkan omzet dan menciptakan lapangan kerja, program ini juga menjadikan pemerintah sebagai pembeli tetap, sehingga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sepanjang tata kelola dilakukan secara transparan dan

inklusif dalam pelaksanaannya dan pemilihan vendor program. Hal ini mendorong peran UMKM dalam program tersebut untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dari program sebagai sarana pemerintah dalam mengembangkan UMKM untuk naik level ke tingkat yang lebih baik dalam segi perekonomian.

Dari berbagai persepektif di atas, program MBG dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong keterlibatan UMKM sebagai penyedia makanan, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal. Dukungan dari instansi pemerintah daerah menunjukkan peluang nyata bagi UMKM untuk dapat terlibat sebagai vendor. Keterlibatan UMKM sebagai vendor membuka akses pasar baru bagi mereka agar mampu tumbuh dan berkembang hingga mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Hal ini membuat keterlibatan UMKM menjadi sangat relevan terlibat dalam program MBG.

b. Potensi Pengembangan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara untuk mengembangkan sesuatu. Secara konsep, pengembangan merupakan keharusan dalam kehidupan yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu secara konseptual, teoritis, dan moral melalui pendidikan atau pelatihan. Sementara itu, usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus, baik oleh perorangan maupun kelompok, untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan, yang dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Melysa, 2022, hal. 12). Dalam konteks ini pengembangan UMKM mengacu pada upaya meningkatkan kapasitas

dan kualitas usaha, baik dari segi manajemen, produksi, maupun sumber daya manusia, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing. Pengembangan ini dinilai sangat penting bagi UMKM karena dengan berkembangnya usaha UMKM, maka UMKM dapat memberikan timbal balik bagi masyarakat dan negara.

Disini peneliti menggunakan indikator pengembangan usaha menurut Fathorrahman (2016) dalam Rizky DKK (2022, hal. 366) sebagai acuan dalam mengetahui potensi pengembangan dari program MBG yaitu sebagai berikut.

1) Peningkatan Pendapatan

Perspektif UMKM dan Dinas Koperasi terhadap adanya dampak yang dihasilkan oleh program terhadap vendor yang menyediakan makanan pada program MBG. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program ini memiliki potensi nyata dalam mempengaruhi UMKM. Adanya program ini mampu menjadi sarana dalam mendorong peningkatan pendapatan. Selain itu, kebijakan MBG dinilai dapat menciptakan stabilitas usaha dikarenakan MBG menciptakan kepastian pendapatan yang sangat penting bagi kelangsungan UMKM. Kasus peningkatan pendapatan ini sesuai dengan manfaat dari program School Feeding Program yang dikemukakan oleh Stéphane Verguet, dkk. (2020, hal. 4), bahwa program pemberian makan memberikan peluang untuk menumbuhkan ekonomi dalam hal pendapatan petani sebagai pemasok bahan baku. Sedangkan dalam konteks MBG di Indonesia

berdampak pada pendapatan UMKM sebagai pemasok makanan program.

Hasil temuan pada UMKM juga menegaskan bahwa program ini secara tidak langsung menciptakan pasar baru yang bersifat keberlanjutan. Dampak ini menjadikan UMKM lebih mudah beradaptasi dengan permintaan pelanggan, yaitu penerima program ini. Di lain sisi, Dinas Koperasi menyoroti pentingnya konsistensi pelaku UMKM dalam melaksanakan perannya sebagai vendor agar dampaknya terhadap UMKM bisa lebih optimal.

Secara keseluruhan, program MBG memiliki potensi sebagai metode dalam meningkatkan pendapatan bagi usaha yang terlibat. Hasil ini menunjukkan program ini memberikan potensi pengembangan yang nyata mengingat pendapatan merupakan indikator penting dalam pengembangan usaha. Peningkatan pendapatan pada UMKM menjadi indikator penting dalam pengembangan usaha, karena pendapatan berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, memperluas produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Peningkatan pendapatan memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, seperti membeli peralatan produksi, melakukan diversifikasi produk, serta memperluas jaringan distribusi. Modal yang cukup akan memperlancar aktivitas produksi, sedangkan tenaga kerja yang terlatih meningkatkan efisiensi operasional (Fathimah, 2025, hal. 643–644).

2) Peningkatan Jumlah Pelanggan

Potensi peningkatan jumlah pelanggan pada program MBG jika UMKM terlibat akan berdampak pada meningkatnya jumlah penjualan produk. MBG berpotensi memberikan pelanggan baru diluar pelanggan umumnya berupa siswa-siswi program MBG sehingga memunculkan basis pelanggan baru. Adanya basis pelanggan yang baru memungkinkan pendapatan dan usaha bisa berkembang. Pendapat ini sesuai dengan Tara Ramroop dan Staff Writer yang menjelaskan bahwa pengembangan basis pelanggan merupakan strategi penting dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi bisnis.

Yang lebih menariknya lagi, program MBG dinilai memberikan peluang promosi bagi vendor penyedia MBG. UMKM dan Dinas Koperasi sepakat bahwa adanya program ini memberikan dampak dalam memberikan wadah promosi melalui *Word of Mouth*. Promosi ini didasarkan pada perilaku penerima program, siswa-siswa yang mengungkapkan cita rasa masakan kepada orang tua siswa. Menurut lupiyoadi (Irawan, 2024, hal. 296), *Word of Mouth* merupakan salah satu Bauran promosi. Informasi mulut ke mulut ini merupakan salah satu strategi promosi yang efektif, karena yang akan menginformasikannya ialah pengguna atau konsumen secara sukarela tanpa disadari karena kepuasan akan pelayanan atau produk yang diberikan. Hal ini memungkinkan UMKM melakukan promosi tanpa mengeluarkan biaya tambahan sehingga mampu memperluas basis pelanggan tanpa biaya

pemasaran tambahan. Dengan kualitas produk yang bagus dan harga yang terjangkau, UMKM dapat menjadikan program ini sebagai sarana promosi untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru.

3) Peningkatan Kualitas Produk

Keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya berpotensi terhadap peningkatan keuntungan UMKM saja, akan tetapi juga mendorong UMKM dalam meningkatkan standar produk UMKM. MBG memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh vendor. Adanya standarisasi gizi makanan yang diberikan membuat UMKM harus mampu beradaptasi baik secara mandiri maupun dengan adanya pelatihan dari pemerintah. Penyesuaian ini didasarkan adanya pengawasan dan evaluasi dalam standarisasi program terhadap vendor penyedia makanan.

Dengan adanya peningkatan kualitas, hal ini mampu menciptakan kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Ini mempengaruhi loyalitas pelanggan pada usaha yang memberikan kualitas produk yang bagus. Menurut Hidayati & Wibowo (Hidayati & Wibowo, 2023), mengatakan bahwa kualitas produk sangat penting dalam menjalankan usaha karena membantu menjaga kepercayaan konsumen.

4) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dapat membantu UMKM beradaptasi

dengan perubahan pasar dan meningkatkan kinerja mereka (Pajri, 2024, hal. 615). Hasil penelitian menerangkan bahwa program MBG memberikan kontribusi dalam mengembangkan SDM pelaku UMKM. UMKM dan Dinas Koperasi mengemukakan bahwa program ini memiliki potensi peningkatan kualitas SDM. Adanya MBG memungkinkan adanya pembinaan dari pemerintah dalam pemenuhan standarisasi. Selain itu, pengalaman dalam menyiapkan makanan dalam program MBG.

Hasil tersebut mengkonfirmasi adanya peluang peningkatan kualitas SDM bagi vendor dalam program MBG. Peningkatan ini dinilai sangat penting karena SDM merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan UMKM, sebagaimana ditegaskan oleh Melysa (2022) bahwa manusia adalah motor penggerak usaha yang perlu dikelola secara profesional. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pajri (2024, hal. 615), bahwa peningkatan kompetensi dan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dapat membantu UMKM beradaptasi terhadap perubahan pasar serta meningkatkan kinerja usahanya. Dengan demikian, keterlibatan dalam program MBG berpotensi mendorong peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan di sektor UMKM.

Berdasarkan indikator pengembangan usaha UMKM yang terdiri dari peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kualitas SDM penelitian ini menerangkan

bahwa adanya program MBG berpotensi terhadap pengembangan UMKM di Banjarmasin. Keterlibatan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi mendorong peningkatan kapasitas produksi sekaligus penyesuaian terhadap standar kualitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, dukungan berupa pelatihan dan pendampingan dari pemerintah turut memperkuat kompetensi SDM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG berpotensi mendorong pengembangan UMKM di Banjarmasin melalui peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, kualitas produk, dan kualitas SDM. Temuan ini selaras dengan penelitian Muhammad Aqil (2021) yang menyebutkan bahwa pengembangan UMKM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, operasional pemasaran, dan kualitas SDM. Dalam konteks ini, MBG dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang memberikan dorongan langsung kepada UMKM, baik dari sisi operasional maupun peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, program MBG tidak hanya relevan, tetapi juga memperkuat temuan sebelumnya mengenai faktor-faktor penting dalam pengembangan UMKM.

Program ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan stabil, sekaligus mendorong UMKM untuk meningkatkan standar produksi dan keterampilan kerja. Melalui pelatihan dan pengalaman langsung, UMKM bisa tumbuh lebih baik lagi dan mampu memenuhi permintaan dalam skala besar dengan kualitas yang sesuai standar gizi. UMKM berharap program MBG dapat berjalan dalam jangka panjang karena dinilai bermanfaat bagi

pemenuhan gizi anak-anak dan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi UMKM. Mereka melihat program ini sebagai upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah gizi, serta ingin terlibat aktif karena keterlibatan tersebut diyakini memberikan dampak positif, baik bagi penerima manfaat maupun bagi keberlangsungan usaha mereka. Selain peluang peningkatan pendapatan dan kualitas produk, penting juga memikirkan bagaimana keterlibatan UMKM ini berdampak dalam jangka panjang. Dalam konteks ini peran UMKM sebagai pemasok makanan perlu diperhatikan kembali terhadap dampak jangka panjang dari pengembangan. Hal ini perlu diperhatikan agar program MBG benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi UMKM.

3. Kendala Program Makan Bergizi Gratis Dalam Pengembangan UMKM

Terlepas dari potensi pengembangan UMKM pada program MBG. Terdapat kendala yang perlu diperhatikan yang memungkinkan munculnya permasalahan pada program tersebut. Berdasarkan analisis video Ferry Irwandi, terdapat beberapa kendala utama dari sisi pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertama, terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran yang harus transparan dan akuntabel karena bersumber dari dana publik (APBN/APBD). Kedua, lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan dari vendor atau UMKM menyebabkan ketimpangan mutu dan risiko kesehatan. Ketiga, implementasi yang terburu-buru tanpa tahapan realistis bisa menyulitkan kesiapan daerah seperti Banjarmasin. Keempat, koordinasi dan pengawasan lintas sektor di daerah masih terbatas, sehingga

rawan terjadi penyimpangan. Kelima, terdapat risiko komersialisasi jika program ini dimanfaatkan oleh industri besar, bukan UMKM lokal. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat agar tujuan gizi dan pemberdayaan UMKM benar-benar tercapai.

Permasalahan dalam kualitas vendor menunjukkan pentingnya sistem seleksi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program MBG. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, program rentan mengalami penyimpangan di lapangan yang dapat membahayakan penerima manfaat, seperti kasus keracunan. Terdapat permasalahan lain dari program MBG, yaitu keterbatasan akses terkait juknis dan regulasi yang menjadikan program ini kurang jelas. Ketidakjelasan ini dikemukakan oleh Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih, yang menekankan pentingnya regulasi dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas serta mudah diakses dalam program MBG. Ia menyoroti bahwa akses terhadap dokumen tersebut masih sangat terbatas, padahal keberadaan regulasi dan juknis sangat penting untuk mendukung keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra lainnya dalam pelaksanaan program secara efektif (CS. Purwowidhu, 2025).

Permasalahan diatas merupakan kendala pada pelaksanaan program di tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat daerah tepatnya di Banjarmasin yaitu sebagai berikut.

a. Kendala Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Instansi Daerah terdapat kendala dari penerapan program MBG pada Pemerintah daerah yaitu sebagai berikut.

1) Kendala Anggaran dan Pendanaan

Kendala anggaran dalam pendanaan menjadi permasalahan utama pada program MBG. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendanaan menjadi kendala paling penting dalam pelaksanaan MBG. Permasalahan terkait pendanaan ini memungkinkan terhambatnya kebijakan MBG. Dana merupakan faktor yang sentral bagi kebijakan pemerintah sehingga dana yang bermasalah membuat kebijakan tidak dapat berjalan dengan lebih efektif. Dari permasalahan ini memungkinkan pertanyaan baru terkait program ini.

Minimnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat menyebabkan kurang efektifnya sistem pendanaan pada program MBG di Banjarmasin. Penggunaan APBN pada program ini tanpa menggunakan dana APBD memungkinkan kebingungan di tingkat daerah. Jika dilihat dari pandangan yang berbeda, penggunaan APBD dapat memengaruhi kebijakan daerah. Meningat bahwa pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini membuat permasalahan anggaran dan pendanaan menjadi permasalahan yang sulit diatasi sehingga memerlukan penanganan yang serius.

2) Ketidakjelasan Regulasi di Tingkat Daerah

Hasil penelitian mengungkapkan kurangnya regulasi yang mengatur program MBG. Ketidakhadiran juknis ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan tentang mekanisme penganggaran, pembagian peran antara pusat dan daerah, serta format pelaksanaan teknis di lapangan. Permasalahan ini memungkinkan hambatan dalam menangani pengelolaan program. Sebagai contoh, Dinas Koperasi yang menangani UMKM sebagai vendor pada program MBG masih belum dilibatkan. Padahal Dinas Koperasi berperan menjembatani UMKM dengan program. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dikarenakan kurangnya penanganan pada vendor penerima program.

Dari segi pelaksanaan regulasi yang ada, kurangnya peran instansi pemerintah daerah mencerminkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan Perpres No, 83 pasal 41 tentang koordinasi BGN dengan instansi lainnya. Permasalahan koordinasi ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pembagian tugas dan fungsi antarinstansi. Ini sejalan dengan Aris Sarjito (2024, hal. 135), menjelaskan bahwa keterbatasan sinergi antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tidak efisiennya alokasi sumber daya.

3) Kendala Sosial dan Persepsi Publik

Tantangan sosial turut menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan program. Banyak masyarakat masih keliru memahami

bahwa tanggung jawab MBG berada di tangan pemerintah daerah. Padahal, secara birokratis, daerah belum memiliki kendali penuh karena belum ada regulasi yang jelas dari pusat. Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme MBG membuat pemerintah daerah memungkinkan menjadi sasaran kritik saat program tidak berjalan maksimal.

Kendala tersebut mengungkapkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Persepsi ini muncul dikarenakan minimnya informasi terhadap program. Informasi tentang mekanisme program ini dapat dikatakan masih minim yang membuat masyarakat bertanya-tanya sehingga seringkali muncul spekulasi dan isu-isu di ruang publik. Ketidakjelasan ini dapat memicu turunnya dukungan masyarakat terhadap program ini sehingga muncul kritik-kritik dari masyarakat ke pihak yang tidak ada kaitannya dengan program dikarenakan minimnya informasi.

4) Kendala Logistik dan Pelaksanaan Lapangan

Di tingkat implementasi, program MBG juga dihadapkan pada tantangan logistik, khususnya dalam hal distribusi makanan. Dinas Pendidikan melaporkan bahwa keterlambatan pengiriman makanan dapat menyebabkan makanan tidak sesuai waktu makan siswa. Kualitas makanan yang mengalami penurunan setelah disimpan lebih dari delapan jam juga menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan dan selera makan anak-anak.

Kendala logistik ini menjelaskan tentang dampak yang dihasilkan oleh minimnya fasilitas dan penerapan di lapangan. Fasilitas dalam pendistribusian makanan menjadi salah satu faktor dalam mendukung program MBG. Hal ini dikarenakan kualitas makanan berat dinilai cepat berubah sehingga penyajiannya perlu diperhatikan dengan ketat. Permasalahan ini sesuai dengan pandangan Aris Sarjito (2024, hal. 135), yang mengungkapkan bahwa minimnya transportasi menjadi hambatan dalam memastikan pendistribusian makanan pada penerima makanan. Perubahan kualitas makanan memungkinkan menurunnya gizi maupun selera siswa sehingga menghambat tercapainya tujuan program.

5) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur

Keterbatasan tenaga kerja di Dinas Pendidikan turut menghambat efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program MBG. Beban kerja yang tinggi, ditambah dengan minimnya personel khusus untuk menangani MBG, membuat intervensi dinas tidak bisa maksimal. Ini menjadi tantangan struktural yang perlu segera diatasi jika pemerintah memang memerlukan dinas menjalankan program tersebut.

Temuan ini menggembarakan kurangnya tenaga kerja yang mengelola program ini dapat menyebabkan tambahan beban kerja bagi pengelola program. Kendala ini dinilai merepotkan dikarenakan permasalahan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penanganannya sulit direalisasikan. Di satu sisi menambah personel mengakibatkan penambahan pengeluaran anggaran dana, dan di sisi lainnya jika tidak

menambah personel mengakibatkan kurang efektifnya program dikarenakan permasalahan pengelolaan.

6) Keterbatasan Dana Per Porsi Program MBG

Kendala pada bagian menjadi salah satu permasalahan dalam program MBG. Dinas Pendidikan mengungkapkan keterbatasan dana dengan nilai Rp. 10.000 per anak menjadi kendala pada daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Permasalahan ini akan mempengaruhi kualitas makanan yang dialokasikan kepada penerima program sehingga baik gizi maupun kualitas makanan akan berdampak mengalami pengurangan.

Dari perspektif UMKM, anggaran Rp10.000 per porsi dalam program MBG tidak mencukupi untuk memenuhi standar gizi layak di Banjarmasin, terutama karena harga bahan pokok di daerah ini lebih tinggi dibanding wilayah lain seperti Jawa. Dengan anggaran tersebut, penyedia hanya mampu menyajikan nasi dan lauk tanpa tambahan seperti telur atau susu yang penting untuk gizi seimbang. Oleh karena itu, mereka mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp14.000–Rp15.000 per porsi agar makanan yang disediakan benar-benar bergizi dan sesuai prinsip 4 sehat 5 sempurna.

Permasalahan nominal dalam anggaran porsi makanan ini dinilai cukup sulit diatasi dikarenakan sudah diaplikasikan pada tahap percobaan. Jika pemerintah menerapkan adanya klasifikasi penerima program berdasarkan status sosial penerima, siswa yang dinilai sudah

mampu yang telah menerima program ini akan merasa tidak adil dikarenakan tidak menerima manfaat program sehingga dapat memunculkan isu baru di masyarakat. Jika dilihat dari penerapan program di luar negeri seperti Amerika Serikat, penerapan klasifikasi penerima diterapkan pada negara tersebut.

Hubungan antara kendala pemerintah daerah dalam program MBG dan kendala dalam pengembangan UMKM adalah karena kendala struktural di tingkat pemerintah akan berdampak pada efektivitas peran UMKM sebagai mitra dalam program ini. Permasalahan yang telah disebutkan di atas dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran dan minimnya dukungan teknis bagi UMKM sebagai mitra pemerintah. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan keterlibatan UMKM dalam program ini.

b. Kendala pada Pengembangan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang melalui peningkatan akses pasar, permintaan produk, dan keterlibatan dalam program. Akan tetapi, dalam memenuhi potensi tersebut, UMKM dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian A. McKinsey & Company dalam Indrawan (2019) mengidentifikasi sepuluh kendala utama UKM, yaitu penjualan tidak stabil, biaya awal tinggi, SDM kurang profesional, minim inovasi, sulit akses pendanaan, keuntungan kecil, rendahnya kepercayaan diri, biaya pemasok tinggi, birokrasi rumit, dan suku bunga memberatkan. Kendala-kendala ini

menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan terjangkau, dan regulasi yang lebih mendukung UKM. Hasil penelitian mengungkapkan kendala-kendala dalam pengembangan UMKM yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

1) Sistem Pembayaran dan Modal Usaha

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, sistem pembayaran dari program MBG tidak dilakukan secara langsung, melainkan baru diterima setelah laporan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disetujui, biasanya pada akhir bulan. Hal ini mengharuskan UMKM untuk menanggung terlebih dahulu seluruh biaya operasional seperti pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, dan logistik. Dalam kondisi usaha kecil yang bergantung pada arus kas harian, hal ini menjadi hambatan signifikan.

Permodalan memang menjadi kendala yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan ini dinilai akan sangat berdampak pada UMKM tersebut dalam memenuhi program MBG sebagai pemasok makanan. Kurangnya modal sangat memengaruhi kegiatan usaha UMKM dalam menyediakan produk. Hal ini dikarenakan modal adalah sumber daya penting yang digunakan sebagai alat dalam membeli bahan baku, alat produksi, dan membayar biaya operasional. Tanpa modal yang memadai, UMKM dinilai mengalami kendala yang signifikan dalam mengembangkan

bisnis dikarenakan modal menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha.

Dalam penelitian Melysa (2022, hal. 15), disebutkan modal adalah salah satu faktor yang mampu memengaruhi kelangsungan usaha. Pandangan ini menegaskan bahwa modal menjadi faktor vital dalam kegiatan usaha bukan hanya dalam mengembangkan usaha, akan tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan usaha itu sendiri. Dalam konteksnya dengan MBG, UMKM yang menjadi mitra pemerintah.

2) Fluktuasi Harga Bahan Baku

Kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba juga dapat menjadi kendala bagi UMKM dalam memenuhi program ini. UMKM menerangkan bahwa ketika harga bahan pokok naik, anggaran yang telah ditetapkan menjadi tidak mencukupi. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi jumlah dan kualitas produksi sesuai standar yang ditetapkan program MBG.

Fluktuasi harga yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kegiatan usaha UMKM terganggu. Pandangan UMKM terkait kenaikan harga bahan baku merupakan kekhawatiran yang beralasan. Hal ini dikarenakan hal tersebut dapat menghambat produksi yang dijalankan oleh UMKM dalam menyediakan makanan pada program MBG. UMKM yang semulanya telah melakukan perencanaan anggaran dapat terganggu, terlebih lagi bagi UMKM yang belum memiliki sistem keuangan yang baik.

Dalam program MBG, program ini menuntut agar vendor dapat konsisten dalam memasok makanan bergizi dalam kapasitas yang besar dengan harga yang tidak berubah-ubah. UMKM yang menjadi vendor dalam program MBG akan kesulitan menjaga kestabilan produksi, harga, dan kualitas makanan dikarenakan harga bahan baku berubah-ubah. Hal ini dapat mmunculkan resiko kegagalan dalam menyuplai makanan.

3) Keterbatasan SDM dan Kapasitas Produksi

UMKM juga mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan jumlah produksi dalam waktu singkat, terutama jika mereka belum memiliki struktur manajemen produksi yang bagus. Dinas Koperasi menerangkan bahwa adanya kemungkinan kesulitan mencari tenaga kerja yang mampu memasak makanan bergizi sesuai standar dan memiliki keterampilan pengolahan yang baik. Dalam beberapa kasus, kualitas makanan menjadi kurang optimal karena dikerjakan oleh tenaga kerja yang kurang terlatih dengan baik.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan dan aktivitas usaha. Kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki UMKM dapat menyebabkan kurangnya kualitas produksi yang dihasilkan. Dalam konteks MBG, SDM yang memiliki keterampilan yang kurang akan menghasikan produk yang kurang sesuai dengan standarisasi gizi yang ditetapkan.

Kurangnya jumlah personel dalam menyediakan produk dapat menyebabkan pemenuhan permintaan tidak terpenuhi. Jika dikaitkan pada program MBG, permintaan pasar dengan jumlah besar mengharuskan UMKM memerlukan SDM tambahan. Akan tetapi, menambah personel membuat permasalahan baru bagi UMKM. UMKM belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji (Putu & Putu, 2021, hal. 20). Permasalahan ini tidak lepas dari permasalahan modal yang menjadi faktor vital dalam usaha.

4) Persaingan Lokasi dan Akses Pasar

UMKM beranggapan terdapat potensi kendala berupa persaingan lokasi, di mana UMKM yang berada jauh dari sekolah mungkin sulit dipilih sebagai penyedia karena alasan efisiensi distribusi. Ini menjadi tantangan bagi UMKM yang berada lebih jauh dibandingkan dengan UMKM yang berada di dekat lokasi Sekolah penerima program.

Persaingan dalam keterlibatan dalam program menjadi kendala yang perlu dihadapi oleh UMKM. UMKM yang berlokasi lebih jauh dari sekolah membuat persentase keterlibatannya lebih rendah dibandingkan dengan usaha yang lebih dekat dengan sekolah. Kendala ini diperparah dengan permasalahan dalam ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh UMKM. Kurangnya fasilitas mengakibatkan terganggunya proses distribusi makanan kepada penerima program. Pengaruh lain dari

permasalahan ini adalah munculnya biaya distribusi tambahan yang mengakibatkan pengeluaran tambahan bagi UMKM.

Kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan keterkaitan erat dengan temuan A. McKinsey & Company dalam Indrawan (2019) mengenai sepuluh hambatan utama dalam pengembangan bisnis. Masalah keterbatasan modal dan sistem pembayaran yang ditangguhkan oleh pemerintah berkaitan langsung dengan tingginya biaya awal dan kesulitan akses terhadap pendanaan. Dalam konteks MBG, UMKM harus membiayai operasional terlebih dahulu sebelum memperoleh pembayaran, yang tentu menjadi beban berat bagi usaha kecil yang bergantung pada arus kas harian. Fluktuasi harga bahan baku yang tidak stabil menambah tekanan terhadap keuntungan UMKM, sejalan dengan kendala "keuntungan yang tidak mencukupi" karena UMKM kesulitan menjaga keuntungan dalam situasi harga pasar yang berubah-ubah.

Keterbatasan SDM juga menjadi tantangan penting yang sesuai dengan temuan tentang "kurangnya keterampilan" dan lemahnya proses rekrutmen. Banyak UMKM masih mengandalkan tenaga kerja yang tidak terlatih secara profesional sehingga berdampak pada kualitas produksi makanan bergizi. Di sisi lain, ketidaksiapan dalam menambah tenaga kerja juga memperlihatkan lemahnya kapasitas finansial, hal ini menunjukkan pengaruh dari keterbatasan modal. Tantangan lokasi dan distribusi menyoroti persoalan akses pasar, selaras dengan kendala "tidak terjadinya

penjualan” dalam penelitian McKinsey, karena UMKM yang berada jauh dari sekolah cenderung kalah bersaing dengan UMKM di lokasi yang lebih dekat. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam program MBG merupakan gambaran dari persoalan struktural yang sering dihadapi UMKM di Indonesia, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Solusi Kendala Program Makan Bergizi Gratis Dalam Pengembangan UMKM
 - a. Solusi dari Kendala Program Makan Bergizi Gratis pada Pemerintah Daerah

Salah satu masalah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah adalah belum adanya regulasi yang jelas. Selain itu, permasalahan lainnya seperti jumlah dana per porsi pada MBG memungkinkan menjadi kendala dalam mencapai tujuan pada program MBG. Dalam menghadapi kendala program MBG di Banjarmasin, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil yaitu sebagai berikut.

- 1) Pembentukan Struktur Organisasi yang Jelas

Kejelasan struktur organisasi menjadi solusi penting yang diusulkan BPKPAD. Hingga saat ini, belum ada struktur kelembagaan yang secara spesifik menangani program MBG, yang menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan pembagian tugas antar instansi. Diperlukan pembentukan struktur organisasi yang jelas, misalnya tim pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Dengan adanya struktur ini, maka setiap instansi atau unit

kerja dapat mengetahui peran masing-masing, sehingga program dapat dijalankan secara lebih efektif.

Pentingnya pembentukan struktur organisasi yang jelas oleh pemerintah pusat dapat menjadi salah satu solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Alasannya adalah program ini melibatkan banyak pihak, proses bersama, dan sumber daya yang harus dikelola secara bersama juga. Kejelasan struktur ini memungkinkan pelaksanaan program lebih terstruktur, sehingga mampu berjalan efisien dan efektif. Tanpa struktur yang jelas, pelaksanaan program memungkinkan terjadinya permasalahan dalam implementasinya di lapangan.

2) Regulasi yang Jelas

Informan BPKPAD menjelaskan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program MBG di daerah adalah belum tersedianya regulasi yang memadai. Saat ini, program belum memiliki petunjuk teknis (juknis), prosedur standar operasional (SOP), maupun landasan hukum formal yang dapat dijadikan acuan oleh instansi daerah. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pengawasan program.

Regulasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam program MBG dapat berjalan dengan semestinya. Regulasi yang jelas menjadi solusi yang penting bagi berbagai pihak yang terlibat pada program MBG. Di

tingkat daerah, pedoman hukum dan teknis terkait mekanisme program menjadi hal yang penting terhadap keberlangsungan program di daerah. Regulasi ini memungkinkan pemerintah daerah dapat berpartisipasi secara lebih efektif, dikarenakan dengan adanya pedoman teknis memungkinkan pengaturan maupun pengimplementasian program dapat disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Jika regulasi masih belum jelas, dampak bagi program MBG adalah terangnya penerapan program di tingkat daerah.

3) Kepastian dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Kepastian anggaran menjadi permasalahan penting dalam pelaksanaan program MBG. BPKPAD menekankan pentingnya penganggaran yang jelas dan terencana agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Tanpa perencanaan anggaran yang matang, program beresiko mengalami hambatan hingga dapat membuat program berhenti diterapkan.

Kepastian dalam pengelolaan anggaran merupakan faktor penting dalam keberlangsungan program di tingkat daerah. Apabila kepastian anggaran tidak diimplementasikan pada program ini, maka dampak yang dihasilkan akan menghambat keberlangsungan program. Program akan terancam tiba-tiba dikarenakan kekurangan dana. Selain itu, tanpa kejelasan dalam pengelolaan anggaran, perencanaan dalam keberlangsungan program tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dampak dari kurangnya kepastian memungkinkan sulit terciptanya

hubungan kerjasama dengan vendor dikarenakan belum adanya perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran.

4) Efisiensi Struktur Kabinet untuk Penguatan Anggaran

Solusi lainnya adalah perlunya efisiensi struktur kabinet di tingkat nasional. Hasil penelitian yang dilakukan pada BPKPAD menegaskan pengurangan jumlah kementerian dapat mengurangi beban anggaran negara, terutama untuk pos-pos rutin seperti gaji ASN. Anggaran yang dihemat dari struktur birokrasi tersebut kemudian dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Solusi ini dinilai memberikan pengaruh tidak langsung dalam menghadapi kendala program MBG. Alasannya adalah dengan mengurangi jumlah personel pemerintahan pusat sehingga mempengaruhi beban anggaran negara. Penghematan sebagai efisiensi dalam penggunaan anggaran membuat alokasi dana ke program yang menjadi prioritas. Pemerintah yang awalnya mengalami kendala dalam anggaran dalam membiayai program MBG mendapatkan dana tambahan dari efisiensi kabinet nasional.

5) Penargetan Program Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi

Informan menyarankan agar MBG difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pendekatan penargetan, anggaran yang sebelumnya dibagi rata kepada seluruh siswa dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas makanan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Sebagai gambaran, jika dana difokuskan hanya

pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, anggaran per anak dapat ditingkatkan dari Rp10.000 menjadi Rp20.000–Rp25.000. Hal ini tidak hanya membuat program lebih tepat sasaran, tetapi juga memungkinkan peningkatan kualitas gizi dan porsi makanan yang lebih baik.

Penargetan program MBG berdasarkan kondisi sosial ekonomi merupakan solusi yang sangat relevan dan efektif dalam mengatasi kendala dana pada program MBG. Strategi ini dinilai sangat efektif dalam efisiensi anggaran serta meningkatkan kualitas makanan bergizi. Hal ini sesuai dengan laman *Feeding America* (2024), menjelaskan bahwa *The National School Lunch Program* (NSLP) yang dijalankan di Amerika Serikat menyatakan terdapat syarat penerima program, yaitu anak-anak berpenghasilan rendah berhak menerima makanan dengan harga diskon atau gratis di sekolah. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu anak-anak dalam rumah tangga dengan pendapatan di bawah 130 persen dari garis kemiskinan atau mereka yang menerima SNAP (*Supplemental Nutrition Assistance Program*) atau TANF (*Temporary Assistance for Needy Families*) - program bantuan yang dikelola pemerintah AS - berhak mendapatkan makanan gratis. Sedangkan keluarga mereka yang berpendapatan antara 130 dan 185 persen dari garis kemiskinan berhak mendapatkan makanan dengan harga diskon.

6) Pemberian Kewenangan kepada Sekolah

Dinas Pendidikan memberikan salah satu solusi strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah dengan memberikan kewenangan langsung kepada pihak sekolah. Saat ini, dinas hanya bertugas menyediakan data siswa tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan program. Dengan pelimpahan kewenangan ke sekolah, proses distribusi makanan dapat disesuaikan secara langsung dengan kebutuhan masing-masing siswa sehingga lebih efisien. Selain itu, apabila peran dinas tetap diperlukan, penambahan sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk memastikan koordinasi yang optimal di tingkat operasional.

Pemberian kewenangan langsung kepada pihak sekolah memang menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program MBG. Dengan adanya wewenang tersendiri bagi sekolah dalam melaksanakan program, sekolah mampu menyesuaikan distribusi makanan secara lebih fleksibel. Fleksibel dalam menyesuaikan distribusi makanan ini memungkinkan lebih efektifnya penyesuaian program karena sekolah secara langsung mengetahui kondisi lapangan. Akan tetapi, pengawasan-pengawasan dari Lembaga yang mengelola program ini perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar permasalahan lainnya tidak akan muncul sehingga program dapat berjalan dengan baik.

b. Solusi dari Kendala Pengembangan UMKM

Adapun solusi yang dapat diambil dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi potensi pengembangan usaha dalam program MBG yaitu sebagai berikut.

1) Stabilisasi Harga Bahan Baku

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu. UMKM menjelaskan naikturunny harga bahan pokok dapat mengganggu anggaran yang telah disusun, terutama dalam memenuhi standar makanan bergizi yang konsisten. Solusi yang ditawarkan adalah adanya intervensi kebijakan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, misalnya melalui subsidi bahan pokok atau pengawasan harga pasar. Dengan menjaga harga tetap dalam kisaran yang wajar, UMKM dapat mengelola anggaran secara lebih terencana dan menghindari kerugian operasional.

Solusi ini menjadi sangat penting dikarenakan bahan baku menjadi sumber daya yang digunakan sebagai penggerak produksi UMKM. Peran pemerintah dalam mengontrol harga bahan baku menjadi upaya pemerintah dalam membantu keberlangsungan UMKM. Hal ini memungkinkan UMKM dapat menyediakan makanan pada program MBG dalam kurun waktu yang lama.

2) Adanya Pelatihan SDM

Pelatihan SDM juga menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Data yang diperoleh dari Nakula Tahu mengusulkan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah agar karyawan lebih siap menghadapi tantangan teknis di lapangan. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen waktu produksi, peningkatan kualitas layanan, serta pemahaman terhadap standar gizi yang ditetapkan. Dengan SDM yang terlatih, UMKM akan lebih efisien dalam memproduksi makanan bergizi dan mampu mempertahankan kualitas secara konsisten.

Upaya pelatihan SDM yang difasilitasi oleh pemerintah mencerminkan pentingnya kapasitas pelaku UMKM sebagai salah satu penentu keberhasilan program. Dalam konteks kebijakan publik, intervensi negara tidak hanya sebatas bantuan material, tetapi juga mencakup penguatan kualitas SDM. Tanpa pelatihan yang memadai, UMKM dinilai akan menghadapi kendala dalam kegiatan produksi dan bahkan tidak sesuai dengan standar gizi. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas SDM.

3) Akses terhadap Pendanaan dan Modal Awal

Kekurangan modal menjadi tantangan umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama karena sistem pembayaran pemerintah dilakukan setelah kontrak diselesaikan. UMKM beranggapan bahwa

bantuan modal sangat diperlukan. Dinas Koperasi menawarkan solusi berupa akses pembiayaan melalui bantuan langsung, pinjaman lunak, serta kemitraan koperasi. Dalam hal ini Dinas Koperasi memberikan dukungan terhadap UMKM melalui program pinjaman *Bahuma* (*Bausaha Tanpa Bunga*), UMKM berkesempatan mendapatkan akses modal tanpa beban bunga, asalkan memenuhi persyaratan tertentu seperti bebas dari pinjaman bank lain dan tidak memiliki riwayat kredit macet.

Permasalahan kekurangan modal yang dihadapi oleh UMKM mencerminkan adanya kendala dalam produksi karena pembayaran dari pemerintah baru diberikan setelah pekerjaan selesai. Hal ini dapat menyebabkan UMKM ragu-ragu terlibat dalam program MBG. Program pinjaman yang diberikan oleh Dinas Koperasi dinilai memberikan kabar baik bagi UMKM yang ingin terlibat dalam program ini. Pembiayaan pinjaman *Bahuma* dari Dinas Koperasi merupakan bentuk dukungan nyata yang dapat mendorong partisipasi UMKM dalam program MBG. Akses modal tanpa bunga memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan produksi tanpa tekanan finansial yang berat, terutama saat harus memenuhi pesanan dalam jumlah besar dengan kualitas yang terstandar. Kemudahan ini juga memperkuat kepercayaan diri UMKM untuk menjalin kerja sama dengan pihak sekolah atau pemerintah.

4) Pengawasan Produk

Agar program MBG dapat berjalan secara optimal, aspek kualitas makanan menjadi faktor penting. Dinas Koperasi mengusulkan adanya petugas pengecek rasa atau “*tukang cicip*” sebagai bagian dari sistem pengawasan kualitas makanan. Peran ini bertugas memastikan bahwa makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar gizi, kebersihan, dan cita rasa yang sesuai dengan anak-anak.

Usulan pembentukan petugas pengecek rasa menunjukkan bahwa kualitas makanan tidak hanya dinilai dari kandungan makanannya, tetapi juga dari rasa makanan agar siswa mau menerima dan mengkonsumsi makanan yang diberikan. Kualitas kontrol yang baik dapat memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Di satu sisi UMKM yang melakukan pengecekkkan dapat memberikan makanan yang berkualitas hingga mampu menjadi sarana dalam mempromosikan produknya. Di lain sisi, penerima makanan mendapatkan makanan yang berkualitas. Solusi ini menjadi sangat efektif dikarenakan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.

Keberadaan petugas pengecek rasa dari masing-masing UMKM penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi cita rasa makanan sebelum didistribusikan ke sekolah. Dengan melakukan evaluasi internal secara rutin, UMKM dapat menjaga standar mutu sesuai dengan pedoman gizi dan selera anak-anak. Hal ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme dalam produksi, tetapi juga membantu

membangun kepercayaan dari sekolah dan penerima manfaat terhadap kualitas makanan yang disediakan.